

Resume dokumen IPPF

Latar Belakang

Program Perikanan Wilayah Pesisir Inisiatif dari GEF dengan arahan dari FAO akan melaksanakan Program Turunan di Wilayah Pengelolaan Perikanan 715,717 dan 718 sebagai bagian kegiatan untuk meningkatkan pemanfaatan jasa lingkungan dan ekonomi melalui penerapan pengelolaan perikanan wilayah pesisir dengan menjalankan prinsip pendekatan berbasis ekosistem, program pengelolaan perikanan, pendanaan berkelanjutan dan meningkatkan pengetahuan terkait pengelolaan dan penyampaian informasi. Program ini terdiri atas 4 komponen, tiga diantaranya akan di biayai dan dijalankan oleh WWF-GEF di Indonesia dan 1 dijalankan oleh Conservation International dan Yayasan Kehati. Tiga komponen yang dijalankan oleh WWF akan mengikuti prinsip kebijakan dan prosedur yang terintegrasi dengan aspek lingkungan dan perlindungan prinsip sosial yang dikembangkan WWF, dimana Kerangka kerja masyarakat adat telah dikembangkan

Di antara komponen Proyek yang dibiayai dan dijalankan oleh organisasi WWF-GEF di Indonesia, kegiatan proyek pada komponen B merupakan kegiatan pelibatan atau melibatkan masyarakat secara langsung yang berdampak terhadap harkat & martabat, hak asasi manusia, pola mata pencaharian, budaya masyarakat adat, atau mempengaruhi kewilayahan, alam atau kekayaan budaya kepemilikan masyarakat adat, termasuk yang mereka gunakan, menempati atau klaim sebagai aset wilayah adat. Masyarakat adat yang terpengaruh meliputi : penduduk asli Kei dan masyarakat di Negeri Kataloka, yang berada di Provinsi Maluku;, Suku Wame, Yeresuah, Yaur dan Umari di Teluk Wondama, Propinsi Papua Barat; serta suku tertentu dari Serui dan Nabire. Komponen B termasuk menyediakan mekanisme kerjasama secara khusus yang ditentukan melalui proses konsultasi selama tahapan pelaksanaan proyek.

Konsultasi, Kebebasan, Persetujuan , dan Keluhan (FPIC)

Kerangka kerja ini berdasarkan keterangan dan masukan yang diperoleh dari tim program, para pihak dari program WWF Indonesia, beberapa pihak yang berkepentingan (stakeholders) termasuk masyarakat yang akan terkena dampak (PAP) dari Seram Timur dan Kepulauan Kei (anggota masyarakat, perwakilan masyarakat adat) diidentifikasi selama proses persiapan kerangka kerja ini, antara bulan Mei sampai dengan Juni 2016. Berbagai upaya telah dibuat untuk menjamin keseimbangan gender selama proses, namun demikian sebagaimana telah disampaikan di bagian rekomendasi, upaya lebih lanjut dalam memastikan konsultasi yang berimbang sebagai mana analisa gender dan proses pelibatan perempuan dalam kegiatan konsultasi dan pelaksanaan Proyek akan meningkatkan safeguard dan aspek lainnya dari proyek sepanjang tahap implementasi.

WWF Indonesia telah mengembangkan koordinasi & komunikasi di antara pihak yang berkepentingan di di tiap lokasi program, dimana proses pelibatan telah dilakukan sebelumnya pada saat awal proyek di jalankan. Berdasarkan hasil sebuah kajian cepat, cukup jelas bahwa konsultasi telah dilakukan secara bebas tanpa paksaan dan telah dilakukan sebelum pelaksanaan proyek. Fokus dari konsultasi adalah kegiatan kegiatan yang telah berkaitan, dibandingkan dengan proyek tersebut. Kebutuhan FPIC termasuk proses dan pendokumentasian yang lebih tinggi tingkatannya telah diberikan oleh tim. Sebagai bagian dari persiapan proyek dan tahapan awal implementasi, masyarakat adat dan masyarakat lokal sebaiknya diberikan informasi yang spesifik dan konsisten dan mengacu terhadap proyek

secara keseluruhan untuk mengantisipasi dampak, mitigasi dan kegiatan monitoring dan evaluasi. FPIC memberikan kerangka kerja dan ringkasan bagaimana FPIC akan didekati melalui konsultasi di masa depan dan selama pelaksanaan proyek, kegiatan monitoring termasuk contoh mekanisme keluhan ganti rugi dan catatan keluhan yang dimonitor secara berkala oleh unit pengelolaan proyek (PMU).

Dampak dan Mitigasinya

Proses penilaian sosial telah dilakukan sebagai bagian dari persiapan dokumentasi safeguard, dengan menanyakan dokumen-dokumen yang disediakan oleh tim lapangan, dan berdasarkan proses konsultasi dengan tim lapangan, pihak yang berwenang dan pihak yang diperkirakan akan terkena dampak. Dampak negatif yang potensial terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat adat telah teridentifikasi lalu dinilai tidak signifikan (tidak penting), namun demikian ada kesepakatan bersama bahwa dampak terhadap masyarakat tersebut perlu dimitigasi melalui pelibatan dan dukungan dalam hal mata pencaharian alternatif, serta pembayaran untuk jasa lingkungan. Hal-hal tersebut sudah termasuk sebagai bagian dari desain proyek, sehingga masih sejalan dengan proses yang sedang berlangsung dengan kelompok masyarakat yang sama. Persiapan rencana di 3 wilayah percontohan (IPP) akan dilakukan untuk menjamin pemilihan setiap orang, pola pendampingan, kontribusi yang dibutuhkan setiap pihak, anggaran dan target alokasi waktu akan direncanakan dan disepakati bersama. Perencanaan mitigasi telah terangkum dalam dokumen ini, dan kerangka IPPs yang akan disiapkan nanti secara khusus untuk setiap lokasi telah tersedia. juga diberikan.

Rekomendasi

Rekomendasi terkait langkah / tindak lanjut mendukung pelaksanaan IPFF ini, dan persiapan yang diperlukan untuk pelaksanaan IPF meliputi: pembagian yang jelas terkait tanggung jawab untuk pengawasan dan pelaksanaan aspek safeguard dari program, termasuk membimbing dan meningkatkan kapasitas para pihak yang bersangkutan termasuk mitra-mitra yang penting; penambahan pengumpulan data untuk menjawab kekurangan di data dasar; menaikan jenjang konsultasi, sosialisasi dan keterbukaan informasi (transparansi) dari mekanisme keluhan, berdasar atas strategi komunikasi program, dengan jenis dan cara penyampaikan informasi yang layak dan tepat, metode dan upaya yang menjamin keseimbangan partisipasi gender, meningkatkan perencanaan dan pendokumentasian untuk memastikan FPIC sesuai aturan.